

WACANA KKN-PPL DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN KALIJAGA

Sabarudin

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga

Abstract

The university student must pay-attention to the problems of society and development, and generally that is what forms the background of obligatory rural or social action internships for advanced university student (KKN) in University.

Nevertheless, the spirit of autonomy put into effect in 1999, educational institution begins to do adjustment or self adaptation to KKN system together with its vision and mission. At first, the models of KKN are the same and regularly, but now they are in various models as we look at Indonesia Islamic University, Gadjah Mada University and The State University Yogyakarta. KKN in IAIN as the only model, now is criticized by many people. The developed opinion is the alternative model, that is KKN-PPL (Field Education Practice) initiated by Tarbiyah Faculty. This article trys to study the history of KKN in IAIN together with developed opinion around KKN and PPL, and alternative that we can think, although it is not the only one choice.

I. Pendahuluan

Akhir-akhir ini gugatan terhadap program KKN di perguruan tinggi kembali mencuat ke permukaan. Gugatan tersebut muncul manakala ada beberapa kasus di lapangan yang menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa KKN di masyarakat dianggap sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Ketidak-relevansian ini disebabkan oleh pesatnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang kurang di imbangi oleh penyiapan kemampuan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan KKN yang kurang optimal. Akibatnya pada masyarakat yang sudah maju, sudah mampu berswadaya serta berswadana dalam membangun daerahnya, tidak lagi merespon keberadaan mahasiswa KKN

sebagai sebuah anugerah, melainkan sebagai beban tersendiri bagi masyarakat, terlebih jika di lokasi tersebut pernah ada mahasiswa yang ber-KKN dan meninggalkan kesan negatif.¹

Di sisi lain, terkadang masyarakat juga terkesan semakin materialistik. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa mahasiswa KKN adalah ibarat dewa penolong yang akan memberikan kucuran dana guna membangun wilayahnya. Itu sebabnya ketika mahasiswa KKN datang ke lokasi, kepada mereka disodori banyak program-program fisik yang diharapkan mampu direalisasikan para mahasiswa KKN.²

Al-hasil, mahasiswa akhirnya bekerja keras seperti para buruh atau pekerja yang ingin mendapatkan pujian dari majikan (masyarakat) karena dianggap mampu memenuhi segala harapan dan keinginan. Mereka, para mahasiswa, bekerja membangun desa, sementara para pemuda kampung dan warga yang lain, ketika melihat aktivitas tersebut hanya menyapa dan tersenyum, dan sedikit yang tergerak hatinya untuk membantu apa yang dilakukan mahasiswa.³

Ironis memang, meski kasus-kasus semacam itu mungkin hanya terjadi di beberapa lokasi KKN IAIN. Sementara di lokasi KKN yang lain yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat menerima dengan suka cita akan kedatangan para mahasiswa KKN. Mereka memperlakukan mahasiswa KKN dengan istimewa, ramah, bersahabat dan penuh rasa kekeluargaan, sehingga butiran-butiran airmata pun berjatuh dan membasahi wajah penduduk maupun mahasiswa KKN manakala sang waktu mengharuskan mereka untuk berpisah.

Itulah sekilas gambaran kondisi mahasiswa KKN di lapangan, ada yang diterima dengan baik dan ada pula yang diterima masyarakat dengan

¹Ada DPL KKN yang menceritakan perihal sikap acuh atau bahkan sikap penolakan terhadap kedatangan mahasiswa KKN dari Kepala Dusun, meski oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, dusun bersangkutan telah ditunjuk sebagai lokasi KKN, sehingga DPL harus berdiskusi panjang dengan Kadus untuk meyakinkannya. Ada juga yang menceritakan bahwa Kadus tetap menolak dan tidak mau menerima mahasiswa KKN di wilayahnya, sehingga mahasiswa terpaksa harus dipindah ke lokasi lain yang mau menerima. Ada juga wilayah yang mau menerima dengan syarat, yaitu mahasiswa harus membayar living cost sesuai dengan kesepakatan para tokoh masyarakat setempat.

²Wilayah-wilayah yang demikian ini biasanya disebabkan oleh kondisi daerahnya yang tandus atau wilayah tidak tandus tetapi pernah ada mahasiswa KKN yang dapat memenuhi semua harapan dari masyarakat, baik program fisik maupun non fisik.

³Kondisi semacam ini pernah diungkapkan oleh mahasiswa peserta KKN IAIN ketika penulis tanya: "Saudara membuat WC umum dibantu oleh para warga atau tidak?". Jawabnya: "ya hanya kami, dari para mahasiswa KKN pak yang bekerja bakti!".

setengah hati. Semua itu merupakan masukan yang sangat berharga bagi pengelola KKN untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan KKN dengan selalu mencari solusi terbaik bagi format KKN agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, rasionalisasi atas beban sks KKN dan percepatan studi yang diharapkan, akhirnya juga memunculkan gagasan-gagasan baru di beberapa perguruan tinggi di luar IAIN Sunan Kalijaga untuk menciptakan model KKN yang dianggapnya lebih sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga nampaknya juga mulai muncul pembicaraan hangat seputar KKN, terutama setelah diterapkannya konsep KKN-PPL di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimanakan konsep KKN-PPL yang dikembangkan di UNY?; (2) Apakah kemungkinan-kemungkinan kendala akan muncul manakala IAIN Sunan Kalijaga menerapkan konsep KKN-PPL?; (3) Alternatif apa sajakah yang mungkin bisa ditempuh untuk mengatasi gugatan seputar KKN di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga?

II. Historisitas KKN Di IAIN Sunan Kalijaga

Agar alur pikir kita ketika mencoba mendiskusikan persoalan KKN tidak terputus, historisitas dari kemunculan program KKN khususnya di IAIN, meski hanya secara ringkas, nampaknya perlu dideskripsikan dalam tulisan ini.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) lahir dari saham mahasiswa pada bidang pembangunan. Ia muncul dari kesadaran bahwa mahasiswa sebagai calon sarjana dapat bekerja untuk pembangunan dengan keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk bekerja di lapangan.⁵

Menurut Koesnadi Hardjosumantri, munculnya gagasan untuk menyelenggarakan KKN sebenarnya didasarkan pada pengalaman yang diperoleh dari dua kegiatan pengabdian sukarela yang dilaksanakan oleh

⁴Menurut Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti, "beban akademik KKN dalam takaran SKS berkisar antara 3-4 sks". Akhirnya muncul keragaman dalam penetapan beban sks KKN pada setiap perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, ada yang memberi beban 3 dan ada yang 4 sks.

⁵Supriatna, dkk. (Ed.), *Buku Pedoman KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: PPM IAIN Sunan Kalijaga, 2001), p. iii.

para mahasiswa, yaitu: *pertama*, pada saat mereka membantu perjuangan fisik melawan Belanda dalam kurun waktu 1945-1949, dan *kedua*, ketika mereka melaksanakan tugas mengajar di luar Jawa dalam rangka Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) pada tahun 1951-1962.⁶

Dalam kurun waktu 1945-1949 para pelajar dan mahasiswa berjuang melawan Belanda dalam kesatuan-kesatuan Tentara Pelajar (TP) dan Corps Mahasiswa (CM) yang didasarkan atas "Ikrar Pelajar" yang dicetuskan di Yogyakarta pada akhir Kongres Pelajar Indonesia yang pertama, 27 September 1945, yang berbunyi : (1) Kami adalah pelajar Negara Republik Indonesia; (2) Menolak menjadi pelajar Pemerintah lain daripada Pemerintah Republik Indonesia, dan (3) Menyediakan tenaga, jiwa dan raga untuk kepentingan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia.⁷

Melalui TP dan CM, para pelajar senior dan mahasiswa mengajar di sekolah-sekolah darurat (*front-schools*) yang menampung para pelajar SLTP dan SLTA di konsentrasi-konsentrasi pengungsian di daerah pedalaman, yang ikut orang tuanya yang tidak bersedia bekerja sama dengan pihak Belanda (non-kooperator). Para anggota TP dan CM membaur dengan rakyat yang merupakan inspirasi kekuatannya, karena medan juang TP dan CM pada umumnya di daerah-daerah gerilya. Berbaur dengan rakyat ini membawa kepada pengembangan kepribadian yang sangat menguntungkan bagi pelajar dan mahasiswa yang bersangkutan.

Dalam era pembangunan, terutama dengan adanya globalisasi serta liberalisasi dan segala aspek persaingannya, peran generasi muda jauh lebih berat daripada generasi-generasi sebelumnya, karena melaksanakan pembangunan dalam keadaan seperti itu memerlukan kemampuan mental dan teknis yang tangguh, yang diperoleh dari pendidikan dan latihan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, dalam rangka mencapai profesionalisme setinggi mungkin di bidangnya masing-masing, cinta tanah air yang mendalam, dan iman serta taqwa yang mendalam pula terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar pengalaman selama TP dan CM serta Proyek TPM, timbullah keinginan untuk diadakannya suatu kegiatan yang membawa para mahasiswa ke pengembangan kepribadian yang mampu mewujudkan cinta Tanah Air yang disesuaikan dengan tantangan pembangunan.

⁶Koesnadi Hardjosumantri, "Menggalai Dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat Melalui KKN", *Makalah*, Diskusi Forum LPM – LSM DIY, di Auditorium UKDW 22 Januari 2003 p. 1.

⁷*Ibid.*, p. 1.

Kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun Akademik 1971/1972, disebut dengan "Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat" sebagai proyek perintis. Pada awalnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tiga Universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas.

Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini lebih ditingkatkan setelah Presiden Republik Indonesia pada bulan Februari 1972 menganjurkan dan mendorong setiap mahasiswa untuk bekerja di desa dalam jangka waktu tertentu, tinggal dan bekerja membantu masyarakat pedesaan memecahkan persoalan pembangunan sebagai bagian dari kurikulumnya.

Dari pengalaman lain, seperti Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), Bimbingan Massal (Bimas) di Institut Pertanian Bogor dan Tenaga Sukarela Indonesia (Butsi) diperoleh bahan dan informasi yang cukup bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam tahun 1973 untuk mengembangkan salah satu kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini disebut Kuliah Kerja Nyata.

Penetapan Kuliah Kerja Nyata sebagai bagian integral dari kurikulum dan bersifat intrakurikuler, mencerminkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan ketetapan Nomor: IV/MPR/1973 tanggal 23 Maret 1973, tentang GBHN, dalam judul "Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembinaan Generasi Muda", yang di dalamnya dinyatakan:

"Meningkatkan Perguruan Tinggi dalam usaha pembangunan, diarahkan untuk: (a) menjadi pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan; (b) mendidik mahasiswa berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia; dan (c) menggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan nasional dan pembangunan daerah"⁶

Pada tanggal 15 Februari 1975, Presiden Republik Indonesia juga kembali menegaskan dalam amanatnya, agar universitas dapat melahirkan sarjana atau tenaga pemikir yang benar-benar memahami arah, tujuan dan seluk-beluk pembangunan yang dilakukan oleh bangsanya. Sebab tanpa memahami arah, tujuan dan seluk beluk pembangunan akan sulit dan

⁶Supriatna, dkk. (Ed.), *Buku Pedoman ...*, p. 6.

malahan mustahil universitas dan para sarjana yang dihasilkannya akan dapat memberikan darma bakti yang berguna kepada bangsanya yang sedang membangun.⁹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang harus aktif dalam proses pembangunan menyadari dengan penuh rasa tanggungjawab, bahwa tenaga ahli agama terdidik dan terlatih yang ada dalam masyarakat masih kurang. Oleh karena itu IAIN harus menerjunkan mahasiswanya secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun agar gerak pembangunan menjadi lebih cepat serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, baik di bidang fisik material maupun di bidang mental spiritual keagamaan.

Sebagai suatu Perguruan Tinggi Agama di Indonesia IAIN terbebani untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat, dan pada akhirnya harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat sejak awal seharusnya seimbang dengan kegiatan pada ke dua darma lainnya.

Pengabdian pada masyarakat oleh IAIN adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan, khususnya agama, yang dilakukan oleh mahasiswa, baik melalui pendidikan dan pengajaran maupun penelitian ilmiah keagamaan kepada masyarakat. Pengabdian dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdikan dalam menunaikan misi IAIN.

Mahasiswa IAIN di samping harus mampu mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam serta

⁹*Ibid...*, p. 7)

Bunyi amanat Presiden tersebut adalah : "Dengan ilmu pengetahuan kita dapat mempercepat usaha untuk membuat mutu kehidupan ini lebih baik. Di samping itu universitas memikul tanggungjawab untuk melahirkan tenaga-tenaga pemikir yang dengan pikirannya itu mampu menunjukkan jalan dan dapat menggerakkan masyarakat untuk membangun. Karena pada akhirnya ilmu pengetahuan harus diabdikan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, maka ukuran penting bagi berhasilnya panggilan tugas universitas bukanlah semata-mata ditentukan oleh banyaknya sarjana yang dihasilkan, tetapi terutama besar kecilnya peran dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan. Karena itu pula di samping menghasilkan sarjana yang memiliki ilmu pengetahuan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, yang berwatak dan memiliki ketinggian moral yang cinta kepada kemanusiaan dan cinta kepada masyarakatnya, maka universitas harus menghasilkan sarjana-sarjana yang benar-benar memahami arah, tujuan dan seluk-beluk pembangunan yang dilakukan oleh bangsanya. Tanpa memahami arah, tujuan dan seluk-beluk pembangunan akan sulit dan malahan mustahil universitas dan para sarjana yang dihasilkannya akan dapat memberikan darma bakti yang berguna kepada bangsanya yang sedang membangun " .

bergairah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, juga seharusnya mereka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial yang terus berkembang. Mahasiswa IAIN diharapkan mampu berperan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dalam masyarakat bangsa Indonesia yang sedang membangun. Mereka seharusnya merupakan sumber motivasi yang dinamis dalam proses pembangunan menuju ke arah inovasi dan modernisasi masa depan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sosio-religius, yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta bertakwa kepada Allah SWT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

Sebenarnya kegiatan-kegiatan pengabdian mahasiswa IAIN pada masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan sesungguhnya telah mulai sejak berdirinya IAIN. Tetapi dalam pelaksanaannya senantiasa masih terjadi ketimpangan dan ketidaksamaaan.

Barulah pada tahun akademik 1976/1977, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai IAIN pertama dan tertua di Indonesia, melaksanakan kegiatan KKN untuk yang pertama kalinya. Namun sampai tahun akademik 1979/1980 status KKN yang dilaksanakan masih ekstra kurikuler. Baru pada tahun 1980, setelah keluar Keputusan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Nomor: 51 Tahun 1980, tanggal 24 Desember 1980, status KKN di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dirubah menjadi intrakurikuler wajib.¹¹

Ketika sistem doktoral diganti dengan sistem SKS, maka kegiatan KKN ditempuh dalam semester 10 dan dihargai 4 SKS. Kemudian manakala terjadi perubahan kurikulum, berdasar Keputusan Menag nomor: 122 tahun 1988, maka program KKN ditempuh pada semester VIII. Untuk mahasiswa yang menggunakan kurikulum baru tersebut, kepada mereka dibebani biaya penyelenggaraan KKN, sebab penyelenggaraan KKN tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah melalui Daftar Isian Proyek (DIP).¹²

Dari buku Pedoman KKN dapat diketahui bahwa tujuan KKN IAIN adalah:

1. Membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan.
2. Berusaha membantu masyarakat memecahkan problematika yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

¹⁰*Ibid...*, p. 2.

¹¹*Ibid...*, p. 3.

¹²*Ibid...*, p. 4.

3. Berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemantapan ketahanan nasional.
4. Untuk menghasilkan calon sarjana sebagai penerus pembangunan yang menghayati permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
5. Untuk mendekatkan IAIN kepada masyarakat dan lebih menyesuaikan pendidikan tinggi kepada tuntutan pembangunan.
6. Meletakkan agama sebagai pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat sehingga pembangunan merupakan amal ibadah.
7. Membentuk sarjana muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab atas kesejahteraan umat serta masa depan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Mendapatkan umpan balik untuk bahan penyempurnaan sistem pendidikan perguruan tinggi yang serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.¹³

Sedangkan dari sisi kemanfaatan, secara umum program KKN mempunyai 4 (empat) manfaat:

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga, melalui keterlibatan dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner.
2. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi, agama dan seni dalam upaya menumbuhkan dan mempercepat gerak serta mempersiapkan kader-kader pembangunan.
3. Perguruan tinggi dapat menghasilkan sarjana pengisi teknostruktur dalam masyarakat yang lebih menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian hasil perguruan tinggi secara relatif menjadi siap pakai dan terlatih dalam menanggulangi permasalahan pembangunan secara lebih pragmatis dan interdisipliner.
4. Meningkatkan hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat lebih

¹³Ibid..., p. 10.

berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitian dengan tuntutan nyata dari masyarakat yang sedang membangun.¹⁴

III. Bentuk Ragam Pelaksanaan KKN pada Perguruan Tinggi di Yogyakarta

Pada era awal pelaksanaan KKN di semua perguruan tinggi di Indonesia hampir terdapat keseragaman dalam pola pelaksanaannya dengan mengacu kepada yang dipolakan oleh Dirjen Dikti, akan tetapi setelah berjalan kurang lebih dua dasa warsa, pelaksanaan KKN di perguruan tinggi di DIY, mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik mengenai pola maupun waktu pelaksanaannya. Walaupun sekarang KKN hanya masuk dalam kurikulum lokal, tetapi beberapa perguruan tinggi di DIY masih tetap konsisten untuk melaksanakannya, karena KKN dirasakan memberikan manfaat baik kepada masyarakat/daerah, mahasiswa maupun perguruan tinggi itu sendiri.

Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di DIY telah mengembangkan program KKN yang tujuannya di samping untuk meningkatkan kualitas sehingga semakin dirasakan hasil pelaksanaannya oleh masyarakat, juga menyesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga mereka bisa menyelesaikan studi tepat waktu.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan setiap perguruan tinggi di DIY sekarang ini telah dikembangkan menjadi beberapa pola, di samping ada KKN reguler ada pula KKN ekstensi, alternatif, mandiri, kemitraan dan reguler khusus. Dalam pelaksanaannya di samping ada yang mengharuskan mahasiswa tinggal/menginap di lokasi, ada pula yang membolehkan dengan cara *melaju*. Dari segi masyarakat sarasannya, di samping ada yang menjadikan masyarakat umum sebagai sasaran kegiatan KKN, ada pula yang hanya masuk ke dalam masyarakat khusus, seperti dunia pendidikan, para pengusaha, lembaga sosial, dan lain-lain.¹⁵

Dari berbagai ragam bentuk atau pola pelaksanaan KKN, oleh Bakor KKN Pemda DIY, dirangkum menjadi seperti berikut:¹⁶

¹⁴*Ibid...*, p. 11.

¹⁵Bakor KKN dan Pemda DIY, *Profil Pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi Se-DIY*, (Yogyakarta: Pemda DIY 2001), p. 16.

¹⁶*Ibid...*, p. 46.

No.	Pola	Deskripsi
01.	Reguler I	KKN dilakukan secara intensif selama 2 bln dengan waktu efektif 250 s.d. 310 jam. Mhs berada dilokasi mulai tahap observasi, penyusunan program, pelaksanaan program dan evaluasi hasil. Adapun sasarannya adalah masyarakat secara umum atau secara khusus.
02.	Reguler II	KKN dilakukan secara intensif selama 40 s.d.45 hari termasuk waktu observasi dengan sasaran masyarakat umum maupun khusus. Adapun jumlah jam efektif antara 225 s.d. 250 jam.
03.	Reguler III	KKN dilakukan secara intensif selama 1 bulan, sedangkan masa observasi dan penentuan serta penyusunan program dilakukan selama 1 s.d. 2 bulan, pada masa observasi dilakukan secara melaju.
04.	Ekstensi	KKN dilakukan selama 2 s.d. 3 bulan dengan ketentuan mahasiswa tidak harus menginap. Adapun sasarannya masyarakat umum maupun khusus. Adapun jumlah jam efektif 5 s.d. 6 jam/hari.
05.	Alternatif I/ Kemitraan	KKN dilakukan selama 2 s.d. 3 bulan dengan sasaran masyarakat khusus dan peserta KKN dipilih secara khusus sesuai kelompok sasaran. Adapun jumlah jam efektif antara 4 s.d. 6 jam/hari.
06.	Alternatif II	KKN dilakukan secara intensif selama 40 s.d.45 hari termasuk waktu observasi dengan sasaran masyarakat umum maupun khusus dan peserta KKN dipilih secara khusus sesuai kelompok sasaran. Mahasiswa tidak harus menginap.
07.	Mandiri	KKN dilakukan atas prakarsa sendiri selama 2 s.d. 6 bulan. Sasarannya masyarakat umum maupun khusus dan mahasiswa tidak harus menginap.

Status KKN dan lokasi serta sasaran yang direncanakan oleh setiap perguruan tinggi di DIY juga beragam. Ada yang menerapkan status KKN sebagai program wajib, ada juga yang hanya sekedar sebagai program pilihan. Demikian pula lokasi wilayah sasaran KKN juga ada yang di kota, ada yang di desa, dan ada juga yang berada pada keduanya.

Data yang dirangkum Bakor KKN Pemda DIY berikut ini akan memberikan gambaran yang lebih kongkrit perihal pelaksanaan KKN dari perguruan tinggi di DIY:¹⁷

No	Nama PPM/LPM	Status KKN	Model KKN	Waktu	Lokasi	Jumlah Sks
01	UGM	Wajib	Reguler I Ekstensi Alternatif I	2 bln 2,5 bln 2,5 bln	Desa Kota Desa	3
02	UNY	Wajib	Reguler I Ekstensi Alternatif I	2 bln	Desa dan Kota	3
03	IAIN	Wajib	Reguler 1	2 bln	Desa	4
04	ISI	Wajib	Reguler I Ekstensi Alternatif I Mandiri	2 bln	Desa/kota Desa Desa/kota Desa/kota	4
05	UST	Wajib	Reguler I Ekstensi Alternatif I	2 bln	Desa/kota	4
06	UII	Wajib	Reguler I Reguler 2 Ekstensi Kemitraan Mandiri	2 bln 3 bln 4 bln 4 bln 4 bln	Desa Desa Kota Desa/kota Desa/kota	3
07	UPN Veteran Yk.	Wajib	Reguler I Alternatif I Alternatif 2 Kemitraan Mandiri	2 bln 3,5 bln - 1 bln -	Pedesaan - - Desa/kota Desa	3
08	UAJ	Wajib	Reguler I	2 bln	Desa	3
09	UAD	Wajib	Reguler 2 Mandiri	3 bln 6 bln	Desa Desa	3
10	UJB	Wajib	Reguler 2 Ekstensi Alternatif I Alternatif 2	45 hari 2,5 bln 2,5 bln 40 bln		

¹⁷Ibid..., p. 47-48.

11	UMY	Wajib	Reguler 3 Alternatif I Mandiri	2 bln - 2 bln	Desa Desa/kota Desa/kota	3
12	UNWAMA	Wajib	Reguler 2	45 hari	Desa	3
13	Instiper	Wajib	Reguler 1 Alternatif 1	2 bln -	Desa Desa	3
14	USD	Wajib	Reguler 2	2 bln	Desa	3
15	UPY	Wajib	Reguler 2	45 hari	Desa	3
16	IST Akprind	Wajib	Reguler 1	2 bln	Desa	3
17	STPMD "APMD"	Wajib	Reguler 2 Alternatif 2	40 hari 40 hari	Desa Desa	3
18	STISIPOL Kartika Bgs	Wajib	Reguler	2 bln	Desa	3
19	SITTM Wates	-	Reguler	45 hari	Desa	3
20	IKIP PGRI Wates	-	Reguler	30 hari	Desa	3
21	STAIMS	-	Reguler	45 hari	Desa	4
22	STIKIP Catur Sakti Btl	-	Reguler Alternatif	30 hari	Desa Desa	4
23	IKIP PGRI Wates	-	Reguler	30 hari	Desa/kota	-

Meski ada keragaman dalam model, tetapi sebagaimana diungkapkan M. Masykur Rahmat, ada lima prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan KKN, yaitu: *pertama*, keterpaduan tiga aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perpaduan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu kesatuan utuh menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKN.

Kedua, interdisipliner. KKN dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu (fakultas, jurusan, program studi) yang berbeda dan pelaksanaannya dikordinasikan oleh PPM. Dalam mekanismenya para mahasiswa mengembangkan pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN.

Ketiga, komprehensif. Dalam hal ini KKN berfungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi kurikulum dan bahkan menambah ataupun melengkapi isi kurikulum yang telah ada. Dengan demikian diharapkan masing-masing individu mahasiswa pelaksana KKN akan menampilkan dirinya sebagai seorang calon sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya secara profesional dan proporsional.

Keempat, pragmatis. Artinya, program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada persoalan nyata di lapangan dapat dilaksanakan, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kelima, partisipatif. KKN adalah proses interaksi dan sinergi antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga mereka menjadi kooperatif dan partisipatif dalam setiap program yang dicanangkan.¹⁸

IV. Menggugat Model KKN Reguler

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa belakangan ini muncul pro dan kontra terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta konon program KKN sudah ditiadakan akibat jangkauan lokasinya yang susah. Di Yogyakarta pembicaraan mengenai masih perlu tidaknya KKN mahasiswa juga mencuat ke permukaan, sampai akhirnya Prof.Dr. Koesnadi Hardjosumantri kembali mengingatkan, bahwa KKN masih perlu dilaksanakan karena banyak manfaatnya.

“Di antara manfaat yang diperoleh dari KKN antara lain membangun kepribadian mahasiswa, memperkuat arti kelembagaan, dan memahami masyarakat. Dengan ikut KKN mahasiswa akan kenal atau tahu kondisi pedesaan secara riil. Pembangunan masyarakat desa mempunyai *joint event* antara mahasiswa KKN dan masyarakat setempat, sehingga interaksi antar keduanya harus dan memang perlu dilaksanakan.”¹⁹

Menurut Koesnadi, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan KKN memang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaannya, akan tetapi tidak mengurangi falsafah, tujuan dan hakikatnya, terlebih lagi untuk meniadakan KKN.²⁰

¹⁸M. Masykur Rahmat, “Manajemen KKN”, *Makalah*, Semiloka Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 Nopember 2000, p. 2-3.

¹⁹Harian Kedaulatan Rakyat, “Kolom Universitas”, 13 Juni 2002

²⁰Harian Kedaulatan Rakyat, “Secara Berkala perlu dievaluasi KKN Pengembangan Kepribadian”, 21 Februari 2003.

Di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga, pembicaraan mengenai KKN kembali mencuat ke permukaan, manakala Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menerapkan kebijakan baru, dengan menggabungkan waktu pelaksanaan KKN dengan PPL, dan memantapkan diri dengan mengambil lokasi di sekolah-sekolah, tempat-tempat industri/kerajinan, serta di perusahaan-perusahaan.

Menurut Sugeng Mardiyono²¹, munculnya gagasan untuk menggabungkan KKN dengan PPL di UNY, sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut, di antaranya adalah sebagai upaya efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang terus bergulir. Praktik lapangan KKN dan PPL menurut mereka pada dasarnya dapat memberikan *life skill* bagi mahasiswa, yaitu pengalaman belajar yang kaya, dapat memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan ketrampilan, kemandirian, tanggungjawab dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Selama ini KKN dan PPL dikelola secara terpisah dan berurutan sehingga sistem praktik lapangan tersebut mengakibatkan waktu studi mahasiswa lebih lama. Untuk itu, perlu dicari jalan keluar dalam pengelolaan kedua mata kuliah praktik lapangan tersebut agar lebih efisien dan bermutu. Salah satu jalan keluar yang dipilih adalah dengan memadukan pelaksanaan KKN dan PPL yang selanjutnya dinyatakan dengan istilah KKN-PPL. Keterpaduan ini mencakup keterpaduan waktu, pengelolaan dan pendanaan.

Tuntutan peningkatan penyelenggaraan mata kuliah KKN-PPL secara terpadu mengandung konsekuensi pada pengelolaan dan menejemen yang profesional sehingga dapat mencapai tujuan kurikuler dari kedua mata kuliah tersebut secara tepat. Sedangkan sistem yang efisien adalah sistem yang dapat mendukung pencapaian tujuan secara tepat waktu atau bahkan lebih cepat, sehingga sistem yang efisien tersebut diharapkan dapat memperpendek rata-rata lama penyelesaian studi mahasiswa UNY yang pada saat ini masih berkisar 5,9 tahun. Untuk itu perlu diterapkan sistem pengelolaan KKN-PPL secara terpadu.²²

Dengan demikian, KKN-PPL adalah penggabungan antara mata kuliah KKN dengan mata kuliah PPL. Penggabungan ini tidak bersifat substansial, melainkan waktu pelaksanaannya yang dibuat bersamaan (dalam waktu

²¹Tim Penyusun, *Buku Pedoman KKN-PPL*, (Yogyakarta: UNY, 2001), p. 1.

²²*Ibid.*

yang sama, yakni selama dua bulan).

Menurut Sugeng Mardiyono, dalam KKN-PPL, program kegiatan saling terintegrasi dan saling mendukung satu dengan lainnya untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga kependidikan. Empat prinsip yang dipakai sebagai dasar dalam pengembangan program KKN-PPL adalah:

1. Keterpaduan KKN-PPL tidak berarti memadukan visi dan misi masing-masing program, karena setiap mata kuliah ini mempunyai visi dan misi yang berbeda. Keterpaduan KKN-PPL pada dasarnya keterpaduan manajemen, baik program maupun pelaksanaannya.
2. Beban mahasiswa yang mengikuti program KKN-PPL setara dengan jumlah sks dari kedua mata kuliah tersebut.
3. KKN yang terpadu dengan PPL disebut KKN-PPL, yang kegiatannya mencakup seluruh komunitas sekolah/ lembaga, di lingkungan lembaga tempat KKN-PPL.
4. Pembimbingan dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Guru Pembimbing yang telah dilatihkan dan mempunyai kualifikasi kegiatan KKN-PPL.²³

Dalam realisasinya, program KKN PPL ini tidak menempatkan semua mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan sekolah, melainkan ada juga yang ditempatkan di kantor-kantor, perusahaan atau industri kerajinan, dan sebagainya. Di sana dari pagi sampai siang hari mahasiswa akan melaksanakan kegiatan PPL sedangkan pada sore harinya mereka akan menempuh kegiatan KKN.

Gugatan cukup keras muncul dari pimpinan Fakultas Tarbiyah. Pimpinan Fakultas, dalam hal ini Pembantu Dekan I, Drs. Tasman Hamami, M.A., menginginkan agar bentuk atau model pelaksanaan KKN yang konvensional ditinjau kembali. Hal tersebut didasarkan pada suatu pertimbangan, bahwa KKN untuk Fakultas Tarbiyah, idealnya lebih berkonsentrasi pada masyarakat yang sifatnya khusus, yaitu masyarakat sekolah. Lebih jauh lagi, pimpinan Fakultas Tarbiyah juga menginginkan agar pelaksanaan KKN waktunya bisa diintegrasikan dengan pelaksanaan PPL II. Wacana tersebut, menurut Drs. Zainal Abidin, bahkan telah sampai ke tingkat rektorat, dan sempat menjadi pembicaraan hangat, meski sampai saat ini belum mendapatkan rekomendasi.²⁴

²³*Ibid...*, p. 1-2.

²⁴Hasil Wawancara dengan Drs. Zainal Abidin, Kepala PPM IAIN Sunan Kalijaga,

Namun demikian, semangat pimpinan Fakultas Tarbiyah untuk menggolkan konsep KKN-PPL nampaknya kembali mendapat moment yang tepat dengan munculnya kebijakan baru "Kurikulum Berbasis Kompetensi" (KBK). Ketika pihak rektorat memberi kesempatan kepada pihak Fakultas untuk membuat draft kurikulum dan silabi, maka hal tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memasukkan mata kuliah KKN-PPL.²⁵

Ada beberapa alasan, yang nampaknya mendasari gagasan penggabungan waktu KKN dan PPL, yang diajukan oleh pihak Pimpinan Fakultas Tarbiyah. *Pertama*, selama ini pelaksanaan PPL-2 mahasiswa Fakultas Tarbiyah selalu menghadapi kendala kedisiplinan dari para mahasiswa. Mahasiswa tidak bisa sepenuhnya melaksanakan PPL-2 di sekolah, karena mereka masih harus mengambil mata kuliah lain di semester VII. *Kedua*, ketika pihak Fakultas akan menjalankan PPL dengan model *block system* dengan mengambil waktu bulan Juli dan Agustus, terbentur dengan pelaksanaan KKN semester pendek, yang juga mengambil waktu pada bulan-bulan tersebut. Akibatnya, sistem blok tidak bisa diterapkan, sehingga permasalahan kedisiplinan tetap menjadi kendala. *Ketiga*, masyarakat, dalam pandangan Pimpinan Fakultas Tarbiyah tidak harus masyarakat secara umum, tetapi bisa masyarakat sekolah, sehingga dengan melaksanakan KKN di sekolah juga sudah merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat. *Keempat*, penggabungan antara PPL dengan KKN akan lebih efisien dari sisi pembiayaan.

Dengan konsep tersebut, mahasiswa tetap melaksanakan KKN, tetapi tempat dan sarasannya bukan masyarakat dalam arti umum, melainkan masyarakat yang lebih khusus, yakni masyarakat sekolah.

Gagasan tersebut ternyata menarik perhatian dari banyak pihak. Dari kalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah, meski belum dilakukan penelitian melalui angket, berdasar pembicaraan-pembicaraan informal tampak ada sikap pro dan kontra. Yang sepakat dengan gagasan penggabungan KKN-PPL menyambut dengan gembira konsep tersebut, karena hal itu dianggap akan mempercepat penyelesaian kuliah. Tetapi bagi yang kontra me-

September 2002. Beberapa kali pertemuan pernah direncanakan dilaksanakan di Rektorat untuk membahas gagasan KKN-PPL dari Fakultas Tarbiyah, tetapi selalu gagal dan tertunda karena ada alasan-alasan teknis yang selalu dipertanyakan oleh para wakil rapat dari beberapa Fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga, dan akhirnya isu itu seolah tenggelam oleh isu-isu baru yang lebih menarik. Maka sampai saat ini KKN yang dilaksanakan di lingkungan IAIN masih bersifat reguler.

²⁵Lihat, Dokumen Draft Struktur Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta tahun 2002.

mandang bahwa dengan penggabungan KKN-PPL dengan sasaran yang lebih khusus, yakni masyarakat sekolah, merasa khawatir jika di belahan pedesaan yang masyarakatnya masih minim tingkat pemahamannya, akan menjadi sasaran empuk kaum misionaris. Demikian pula di kalangan tenaga pengajarnya, juga terjadi pro dan kontra.

V. Kendala dan Solusi Alternatif

Beberapa kendala mungkin akan muncul manakala konsep KKN-PPL tersebut ditawarkan kepada fakultas-fakultas lain di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Memang diakui bahwa selain Fakultas Tarbiyah juga ada beberapa Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki program kegiatan PKL, yang juga membutuhkan waktu dan biaya tersendiri dari mahasiswa. Tetapi jika diterapkan model KKN-PPL, selain Fakultas Tarbiyah mungkin hanya Fakultas Dakwah yang tidak akan mengalami kesulitan mencari lokasi sebagai subyek sekaligus obyek kegiatan. Sementara itu, ketiga fakultas lainnya yakni Adab, Ushuludin dan Syariah, mungkin akan mendapat kesulitan untuk mencari tempat ber-KKN yang sesuai dengan bidangnya. Misal, Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama. Meski di Yogyakarta ada kantor Pengadilan Agama, tetapi jumlahnya relatif sedikit, sehingga akan sangat sulit jika harus menempatkan mahasiswanya yang cukup banyak. Demikian pula Fakultas Ushuludin jurusan Filsafat, akan kesulitan menempatkan mahasiswanya di lapangan, disebabkan minimnya lembaga-lembaga kajian filsafat yang ada.

Di samping itu, kemungkinan juga tidak sedikit dari kalangan Dosen yang selama ini aktif dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk dakwah dan sebagainya akan merasa keberatan manakala IAIN Sunan Kalijaga tidak lagi menerjunkan KKN mahasiswa ke daerah-daerah yang masih minus pemahaman dan pengamalan agamanya. Sebab bagaimanapun, diakui atau tidak, IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya, termasuk perguruan tinggi yang cukup diperhitungkan dalam kaitannya dengan peran sertanya ikut menjaga keutuhan umat Islam di DIY khususnya dari rongrongan iman kaum misionaris. Maka dengan mengalihkan KKN mahasiswa dari sasaran masyarakat umum ke masyarakat khusus dikhawatirkan akan menambah luasnya kaum misionaris dalam memasuki daerah-daerah yang miskin materi maupun ruhani.

Praktik lapangan KKN pada dasarnya dapat memberikan *'life skill'* bagi mahasiswa, yaitu pengalaman belajar yang kaya, dapat memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan di bidangnya, meningkatkan ketrampilan, kemandirian, tanggungjawab dan

kemampuan dalam memecahkan masalah.

Hakekat KKN adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi (1) darma pengajaran, (2) darma penelitian, dan (3) darma pengabdian kepada masyarakat. Tridarma Perguruan Tinggi sebagai doktrin perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya merupakan sari dari tujuan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.²⁶

Meskipun pada permulaannya KKN merupakan kegiatan yang menggabungkan dharma pertama dan dharma ketiga, yaitu darma pengajaran dan darma pengabdian kepada masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya, pelaksanaan KKN melibatkan pula dharma kedua, yaitu darma penelitian. Dengan demikian KKN merupakan pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi secara keseluruhan, sehingga KKN merupakan sub-sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Fokus utama dari KKN, menurut Koesnadi, adalah pada aspek mental para mahasiswa yang berkaitan dengan pengabdianannya kepada bangsa dan negara sebagai perwujudan cinta Tanah Air. Apabila mahasiswa menganggap diri sebagai pembela rakyat, maka ia harus memahami aspirasi rakyatnya dengan tinggal di tengah-tengah rakyat itu sendiri. Meskipun KKN dilaksanakan dalam jangka waktu pendek, namun hal tersebut sudah dapat merupakan langkah awal untuk berintegrasi dengan rakyat.²⁷

Sedangkan fokus lainnya, secara ideal adalah membiasakan diri untuk berpikir secara multi dan interdisipliner, dan dengan demikian memasukkan dalam diri pribadi sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan ini merupakan keadaan mental (*state of mind*) yang harus ada pada setiap cendekiawan, termasuk mahasiswa sebagai cendekiawan muda, yang harus mampu menginternalisasikan cara berpikir alternatif. Dengan demikian, KKN diarahkan kepada: (a) Pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*); (b) Pengembangan kelembagaan (*institutional development*); (c) Pengembangan masyarakat (*community development*), sehingga penetapan KKN sebagai bagian integral dari kurikulum dimaksudkan untuk mendidik mahasiswa berjiwa pengabdian, serta memiliki rasa tanggungjawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Apalagi dalam kenyataan, jika dilihat latar belakang asalnya, secara umum, mahasiswa dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : (1) Mahasiswa yang tinggal di desa dan "melaju" (*commuting*) ke perguruan tingginya di

²⁶Koesnadi, *Mengali...*, p. 7.

²⁷*Ibid*, p. 6.

kota; (2) Mahasiswa yang tinggal di kota akan tetapi berasal dari perdesaan dan kembali ke desanya pada waktu-waktu tertentu; dan (3) Mahasiswa yang bertempat tinggal di kota dan tidak pernah ke desa.²⁸

Bagi kelompok pertama, kehidupan perdesaan sudah sangat dipahami karena tinggal di tengah-tengah rakyat di desanya. KKN bagi yang bersangkutan tetap penting karena melalui KKN belajar memecahkan masalah perdesaan dari sudut multi dan interdisipliner dalam kaitannya dengan bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas-fakultas yang ada di dalam kelompok KKN-nya.

Sedangkan bagi kelompok kedua, biasanya mengalami sedikit banyak keterasingan dengan kehidupan di desa karena bertempat tinggal di kota. KKN penting bagi kategori mahasiswa ini, karena KKN berarti menyegarkan kembali pemahaman tentang kehidupan perdesaan dan membiasakan diri berpikir secara multi dan interdisipliner melalui kelompok KKN-nya.

Adapun untuk kelompok ketiga, KKN bagi kategori ini penting, karena dengan demikian mereka mulai memahami kehidupan di perdesaan dan mencoba memecahkan masalah perdesaan dengan pendekatan inter dan multidisipliner dalam kelompok KKN-nya. Dengan kata lain, bahwa bagi semua kategori mahasiswa, KKN mempunyai makna yang penting yang mempengaruhi pengembangan kepribadiannya.

Beberapa keuntungan yang diperoleh melalui KKN, menurut Sumbo Tinarbuko, meliputi: *pertama*, mahasiswa memperoleh pengalaman melalui keterlibatan dengan masyarakat binaan secara langsung dalam menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner. *Kedua*, mahasiswa dapat menyumbangkan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi, dan seni dalam upaya untuk menumbuhkan, membina dan mempercepat dalam menyiapkan kader-kader pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat binaan. *Ketiga*, merintis kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah.²⁹

Di antara perguruan tinggi yang ada di DIY, sebagaimana dipaparkan di atas, ternyata juga menerapkan model KKN yang berbeda-beda. Tetapi, meski bentuk atau model KKN berbeda-beda, tetapi hakikat dan tujuannya tetap sama, yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hanya saja pemahaman ter-

²⁸*Ibid*, p. 7-8.

²⁹Sumbo Tinarbuko, "Kuliah Kerja Nyata", dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, Senin 24 Juni 2002, p. 2.

hadap masyarakat sebagai sasaran kegiatan KKN itu yang kemudian mengalami konotasi berbeda menurut masing-masing perguruan tinggi. Ada masyarakat yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus.

Dalam kaitan tersebut, melalui gagasan atau model KKN PPL pihak UNY berusaha mengkhususkan pengertian masyarakat ke dalam masyarakat yang khusus, yakni masyarakat pada lembaga pendidikan maupun instansi lain. Oleh karena itu sasaran kegiatan KKN PPL di UNY bukan masyarakat umum.

Dalam realisasinya, program KKN PPL ini tidak menempatkan semua mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan sekolah, melainkan ada juga yang ditempatkan di kantor-kantor, perusahaan atau industri kerajinan, dan sebagainya. Di sana dari pagi sampai siang hari mahasiswa akan melaksanakan kegiatan PPL sedangkan pada sore harinya mereka akan menempuh kegiatan KKN.

Dilihat dari gambaran sekilas sebagaimana disebutkan di atas, tampak bahwa dengan model KKN PPL sebagaimana diterapkan oleh UNY, ada beberapa aspek positifnya, di antaranya adalah:

1. Dalam waktu yang bersamaan mahasiswa dapat melaksanakan dua kegiatan sekaligus, sehingga bisa mempercepat penyelesaian studi.
2. Dari sisi biaya, mungkin lebih efisien (murah).
3. Mahasiswa dapat mendarmabaktikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya pada masyarakat (lingkungan sasaran) yang tepat.

Namun demikian, jika dilihat dari aspek negatifnya, dengan model KKN PPL yang dilaksanakan secara bersamaan waktunya, akan terlihat hal-hal sebagai berikut:

1. KKN hanya akan terpusat pada lembaga, dan tidak dirasakan oleh masyarakat dalam arti yang luas.
2. Akan terjadi kejenuhan pada lembaga yang terus menerus dijadikan sebagai lokasi KKN-PPL. Apalagi jika di tempat tersebut tidak hanya satu perguruan tinggi yang melaksanakan program KKN-PPL dalam waktu yang bersamaan.
3. Nilai dakwah Islamiyah yang selama ini dijunjung tinggi oleh IAIN akan tereduksi sedemikian rupa, sehingga akan memungkinkan pihak non muslim melakukan invasi dengan tanpa *counter* sedikitpun.

Dengan demikian tawaran KKN alternatif dengan model KKN-PPL seperti di atas, khususnya untuk IAIN Sunan Kalijaga, tampaknya masih terus menerus harus didiskusikan guna mencari format yang terbaik. Sebab,

bagaimanapun IAIN Sunan Kalijaga adalah salah satu aset 'penjaga gawang iman' masyarakat dari kemiskinan spiritual, sehingga komitmen kemasyarakatan dalam arti yang luas (dakwah Islamiyah) perlu terus menerus dipertahankan.

Akan tetapi bersikukuh pada pendapat masing-masing, yaitu satu pihak bertahan dengan model KKN reguler dan pihak yang lain tetap menuntut model KKN alternatif (semisal KKN-PPL) tanpa mencoba mencari jalan keluar yang terbaik adalah tindakan yang kurang bijaksana.

Menghadapi polemik tersebut, tampaknya ada beberapa hal yang mestinya ditempuh atau dilakukan oleh pengelola maupun pengambil kebijakan di IAIN Sunan Kalijaga yaitu:

A. Pengkajian Ulang Model KKN

Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, model KKN yang ada di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanya model reguler dengan sasaran masyarakat pedesaan yang sifatnya umum. Model ini nampaknya perlu dievaluasi kembali tingkat efektifitasnya. Sebab suatu ciri lembaga ilmiah adalah selalu melakukan kaji ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diluncurkan, apakah sudah benar penerapannya atau sasarannya. Dengan kata lain, pengelola KKN harus bersikap bijak dalam menghadapi kritik. Sangat tidak bijaksana apabila pengelola KKN mengabaikan kritik, karena di samping kritik yang muncul ada yang negatif tentu banyak pula kritik konstruktif yang apabila diperhatikan dan ditindaklanjuti justru akan lebih meningkatkan kualitas program dan pelaksanaan KKN.

Oleh karena itu, ketika kritik atas model KKN reguler dan permintaan model KKN lain muncul, maka KKN model alternatif tersebut perlu dikaji³⁰, dan jika memungkinkan perlu ditawarkan, sehingga secara kontinyu akan muncul dinamika yang positif. Memang tidak dinafikan, bahwa sejak awal perintisan KKN sampai dengan pelaksanaan KKN angkatan ke-50 tahun akademik 2003/2004 dalam pengelolaan KKN tentu telah mengalami pengembangan, perubahan dan penyempurnaan untuk mengikuti dan me-

³⁰Pengkajian ini bisa dilakukan melalui penelitian terhadap efektivitas program KKN-PPL seperti yang dilaksanakan oleh UNY, baik dari sisi proses pengelolaan maupun hasil. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesalahan atau sikap 'latah' (suka meniru) dalam menetapkan suatu kebijakan akibat tidak adanya studi kelayakan atau studi lapangan terlebih dahulu. Sebab belum tentu sesuatu yang tampaknya efektif secara teoritik dalam praktiknya dapat berjalan secara mulus.

nyesuaikan dinamika perubahan masyarakat dalam pembangunan. Tetapi juga perlu diingat, bahwa Prof. Koesnadi Hardjosumantri, sebagai tokoh yang banyak menaruh perhatian pada KKN juga mengungkapkan, bahwa "pemahaman dari civitas akademika akan arti KKN dan falsafah, tujuan dan hakikatnya yang telah mengalami pengembangan dari mulai timbulnya gagasan sampai dengan pelaksanaannya, perlu digalakkan melalui dialog-dialog".³¹

Termasuk ketika muncul wacana KKN-PPL yang sebenarnya merupakan bentuk KKN alternatif dengan sasaran khusus, semisal masyarakat sekolah sebagaimana yang dituntut oleh fakultas Tarbiyah, maka gagasan ini juga perlu didiskusikan secara proporsional, baik subyek sasaran, visi KKN, maupun pola manajemennya.³² Sebab setiap perubahan pada model KKN tentu akan membawa implikasi pada persoalan-persoalan tersebut.

Terkait dengan subyek sasaran KKN, selama ini sasaran KKN IAIN Sunan kalijaga adalah masyarakat umum dan khusus, terutama di pedesaan. Beberapa kali KKN IAIN memang pernah ditempatkan di dalam kota dan atau pinggiran kota, tetapi tampaknya tidak sesukses ketika ditempatkan di wilayah pedesaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh prioritas program KKN IAIN yang lebih pada bidang sosial keagamaan dibanding aspek lain semisal fisik.

Ketika model KKN-PPL ditawarkan dengan subyek sasaran masyarakat sekolah, maka hal ini juga perlu didiskusikan, bagaimana jika sasaran KKN-PPL tidak hanya masyarakat sekolah, tetapi juga masyarakat umum di luar sekolah, dengan pembagian kerja: pagi sampai siang berada di sekolah dan sore sampai malam berkiprah di masyarakat. Konsep demikian memang beresiko pada pencarian wilayah pedesaan yang di situ ada lembaga pendidikan formalnya.

Kemudian, terkait dengan paradigma KKN, maka dalam hal ini pihak pengelola KKN harus selalu mencermati perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, agar paradigma KKN selalu *up to date* dengan perubahan

³¹Harian Kedaulatan Rakyat, "Secara Berkala.....", Jum'at 21 Februari 2003.

³²Perlu dicatat bahwa pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa terhadap pimpinan Fakultas Tarbiyah perihal kapan kebijakan KKN-PPL akan direalisasikan, semakin hari semakin santer. Terlebih dari para mahasiswa yang mengikuti program PPL 2 Terkonsentrasi (*block system*). Mereka mempertanyakan hal tersebut karena ketika berada di lapangan (sekolah) mereka berinteraksi dengan para mahasiswa UNY yang sedang ber-KKN-PPL di sekolah tersebut, dan mereka tahu betul bagaimana dan apa saja yang dikerjakan dalam KKN-PPL, yang dianggapnya tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka laksanakan dalam PPL 2 Terkonsentrasi.

sosial. Hasil evaluasi KKN yang diselenggarakan oleh Pemda Bantul dan dihadiri oleh para utusan dari LPM/PPM Perguruan Tinggi di DIY, Camat dan Kepala Desa se-kabupaten Bantul pada tanggal 18 Desember 2003 di Yanti Restoran Bugisan Kidul Bantul, setidaknya mengisyaratkan dan atau mengingatkan bahwa paradigma KKN sekarang dan ke depan adalah paradigma pemberdayaan masyarakat. Artinya, bahwa penekanan KKN bukan pada pembangunan fisik, tetapi pada Sumber Daya Manusia. Dengan demikian, mahasiswa KKN harus dipersiapkan agar mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi mandiri, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, politik maupun yang lainnya.³³

Beberapa dari Kepala Desa juga meminta kepada pihak perguruan tinggi (c.q. PPM/LPM) agar dalam pembekalan KKN persoalan sopan santun, kepribadian, dan pengenalan terhadap tradisi lokal diberikan, sehingga ketika berada di lokasi mahasiswa dapat menyesuaikan diri, bukan sebaliknya malah mengacak-acak tatanan yang sudah dianggap mapan.³⁴

Terkait dengan pola manajemen KKN, menurut M. Masykur Rahmat, ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan berbagai pihak terutama fakultas-fakultas. *Pertama*, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tetap dilaksanakan dan desentralisir di LPM/PPM. Untuk itu maka LPM/PPM akan membentuk satuan-satuan organisasi yang salah satu di antaranya adalah Pusat Pengelolaan KKN dengan segala kewenangannya, sejak dari rekrutment mahasiswa, dosen pembimbing, tenaga pelaksana dan keuangan sampai dengan penilaian. Untuk personil

³³Jika tidak memberatkan bagi mahasiswa dan pengelola KKN, guna membekali mahasiswa dengan berbagai ketrampilan praktis atau kemampuan manajemen usaha atau lainnya, mungkin bisa ditempuh dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial atau Depnaker. Kemudian dalam selama waktu tertentu mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, manajemen usaha, dll. sebagai syarat untuk mengikuti program KKN. Sehingga meski tekanan KKN IAIN pada bidang sosial keagamaan, tetapi para mahasiswa KKN juga mampu melakukan pemberdayaan masyarakat pada sisi ekonomi. Menurut Drs. Kasidi, dari LPM ISI Yogyakarta, mahasiswa KKN ISI meski secara akademik tidak dibekali dengan ketrampilan usaha dan teknologi, tetapi berhasil memberdayakan masyarakat pengrajin topeng yang ada di lokasi KKN. Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena ke depan perijinan KKN sifatnya *down up* bukan lagi *top down*, sehingga jika tingkat RT, dusun atau desa (*grassroot*) tidak senang dengan bentuk KKN yang ditawarkan oleh suatu perguruan tinggi, maka pihak kecamatan tidak bisa memaksakan wilayah tersebut sebagai lokasi KKN. (Hasil Evaluasi KKN, 18 Desember 2003).

³⁴Contoh yang dikemukakan oleh salah satu Kepala Desa adalah ketika ada pertemuan kampung, di mana tradisi masyarakat desa memakai sarung dan baju batik atau baju lengan panjang, tetapi ketika mahasiswa ikut nimbrung, penampilan mereka cukup mengejutkan, karena memakai celana panjang dan kaos oblong. (Hasil Evaluasi KKN, 18 Desember 2003).

pendukungnya harus diambil dari berbagai fakultas di lingkungan PT yang bersangkutan.

Kedua, KKN dilaksanakan oleh masing-masing fakultas dengan dikoordinir oleh LPM/PPM. Untuk itu diperlukan kesepakatan-kesepakatan sampai di mana batas kewenangan masing-masing satuan organisasi tersebut, dan bila perlu di susun suatu buku pedoman teknis yang berlaku untuk semua fakultas. Oleh karena KKN mempunyai nuansa yang berbeda dengan PKL atau program pengabdian masyarakat lainnya, maka prinsip-prinsip dasar tersebut tetap harus muncul walaupun dalam kadar dan proporsi yang berlainan.³⁵

Seiring dengan tuntutan otonomi fakultas, model kedua ini tampaknya akan banyak dituntut oleh fakultas-fakultas di lingkungan IAIN, khususnya fakultas Tarbiyah, sebagai wujud dari tuntutan otonomi pengelolaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di tingkat fakultas, dalam kerangka pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumberdaya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar.

Namun demikian, menurut Masykur, cara kedua ini akan dapat menimbulkan berbagai masalah baru yang mungkin sangat mendasar dan mungkin akan terjadi adanya kendala teknis. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) apakah KKN per-fakultas dapat menjamin terlaksananya pola pikir dan pola kerja interdisiplin di kalangan mahasiswa. Apakah pola yang ada akan lebih banyak bernuansa PKL atau pengabdian masyarakat per-fakultas; (2) Hal ini akan menyibukkan LPM/PPM bila masing-masing fakultas memerlukan pemantauan dan evaluasi lapangan. Lebih-lebih bila waktunya tidak dapat bersamaan dan sangat variatif; (3) Akan terjadi pemborosan dalam bidang pembiayaan karena semakin banyak jalur birokrasi yang harus dilewati; dan (4) Wajah Universitas/Institut tentu tidak secantik bila dilaksanakan secara bersamaan dan dalam satu kesatuan.³⁶

Oleh karena itu dibutuhkan kearifan dari berbagai pihak dalam memutuskan suatu kebijakan terkait dengan pengelolaan KKN, agar tidak terkesan tergesa dan emosional. Sebab jika didasari oleh ketergesaan dan sikap emosional dikhawatirkan justru tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru yang lebih ruwet.

Di samping itu, jika di lingkungan IAIN ada model KKN alternatif

³⁵M. Masykur Rahmat, "Manajemen Kuliah Kerja Nyata", p. 4-5.

³⁶*Ibid...*, p. 5-6.

selain model reguler, maka juga dibutuhkan manajemen pengelolaan yang lebih rumit atau tidak sederhana, jika ingin mendapatkan hasil yang optimal. Sebab jika ada bentuk reguler dan bentuk alternatif (KKN-PPL) di mana subyek sarannya agak berbeda, penekanan kegiatan juga agak berbeda, tentu juga berimplikasi pada pola bimbingan.

B. Memperketat Persyaratan KKN

Hal ini bisa ditempuh dengan membuat ketentuan, bahwa mahasiswa yang boleh mengikuti KKN semester pendek hanyalah mereka yang telah mencapai 100% dari keseluruhan beban mata kuliah teori. Dengan cara ini maka para mahasiswa semester VI yang mengikuti KKN semester pendek jumlahnya tidak akan membludak seperti yang selama ini terjadi.

Sebab dengan membludaknya jumlah peserta KKN semester pendek menjadikan proporsi jumlah peserta KKN pada semester gasal, genap dengan semester pendek tidak seimbang, sehingga ada kesan bahwa KKN IAIN itu hanya pada semester pendek. Hal tersebut dapat dicermati pada tabel sebagai berikut :

No.	Angkatan/ Semester.	Jumlah Peserta	Waktu / Periode
1.	40 / Pendek	886	Juli - September 2000
2.	41/ Gasal	20	September - November 2000
3.	42/Genap	127	Maret - Mei 2001
4.	43/Pendek	1050	Juli - September 2001
5.	44/Gasal	17	September - November 2001
6.	45/Genap	132	Maret - Mei 2002
7.	46/Pendek	1248	Juli - September 2002
8.	47/Gasal	22	September - November 2002
9.	48/Genap	245	Maret - Mei 2003
10.	49/Pendek	1289	Juli - September 2003
11.	50/Gasal	26	September - November 2003

Ket. : Sumber Lap. KTA KKN IAIN SUKA November 2003

Pertimbangan lain, bahwa dari aspek psikologis, kesiapan mental mahasiswa semester VI secara umum belum begitu siap untuk terjun dalam masyarakat, sehingga akhirnya bukan upaya pemberdayaan masyarakat yang terjadi tetapi malah sebaliknya. Padahal masyarakat menghendaki agar mahasiswa yang diterjunkan dalam program KKN adalah mereka

yang secara mental sudah siap dan memiliki bekal yang cukup untuk membantu masyarakat dalam memberdayakan diri dalam berbagai aspek.

VI. Penutup

Demikianlah pembahasan seputar KKN-PPL yang saat ini sedang menjadi isu aktual di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mudah-mudahan beberapa butir gagasan yang tertuang dalam tulisan ini bisa merangsang dan membuka wacana baru bagi siapapun yang tertarik dengan isu KKN-PPL.

Daftar Pustaka

- Bakor KKN Pemda DIY, 2001, *Profil Pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi Se-DIY*, Yogyakarta: Pemda DIY
- Fakultas Tarbiyah IAIN, 2002, Draft "Konsep Program Pengajaran Mikro, PPL/Magang dan KKN Integratif".
- Harian Kedaulatan Rakyat, "Prof Koesnadi: KKN Banyak Manfaatnya", Kamis 13 Juni 2002
- Harian Kedaulatan Rakyat, "Secara Berkala Perlu Dievaluasi KKN Pengembangan Kepribadian", Jum'at 21 Februari 2003
- Jajah Koswara, 1993, "Kebijaksanaan dan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi", dalam Agus Salim Sitompul (Ed.), *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, Yogyakarta: P3M IAIN Suka Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2003, "Menggali Dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat Melalui KKN", *Makalah*, disajikan pada Diskusi Forum LPM - LSM DIY, di Auditorium UKDW 22 Januari 2003.
- M. Masykur Rahmat, "Manajemen KKN", *Makalah*, Semiloka Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 Nopember 2000
- PPM IAIN Sunan Kalijaga, 2001, *Buku Pedoman KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Sugeng Mardiyono, "Kemitraan LPTK Dengan Sekolah Dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan", *Makalah* Pembekalan Mahasiswa KKN-PPL, 11-14 Mei 2002 di UNY
- Sukidjo, "Bobot Kredit KKN", *Makalah*, Semiloka Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 Nopember 2000
- Sumbo Tinarbuko, "Kuliah Kerja Nyata", dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, Senin 24 Juni 2002.

Supriatna dan Indal Abror, *Bentuk Kegiatan dan Pola Pembimbingan Mahasiswa KKN, Makalah, Semiloka Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 Nopember 2000*

Tim Penyusun, *Buku Pedoman KKN-PPL, Yogyakarta: UNY, 2002*

VM. Tri Mulyani W., "KKN Dulu Vs Kini", dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, Kamis 13 Juni 2002

